

TESIS

**PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan*



Oleh :

YOFI PERMANA. R, S.H

NIM : 1620123077

PEMBIMBING :

Prof. Dr. ZAINUL DAULAY. S.H., M.H

DASMAN.SH., M.Kn

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2018

**PENGATURAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS
YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN PRAKTEKNYA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

ABSTRAK

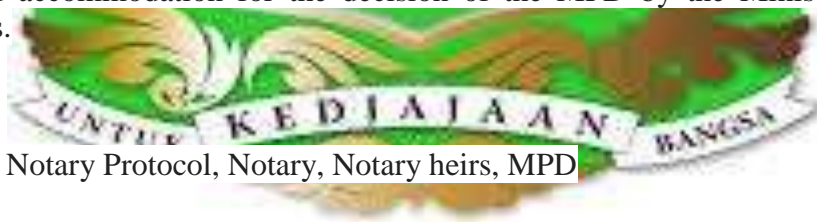
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan undang-undang mengenai bagaimana Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Sumatera Barat? dan tanggung jawab ahli waris terhadap Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut? serta tindakan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris Penerima Protokol tersebut? untuk mencapai tujuan dari penelitian ini metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapannya dilapangan, data yang diteliti awalnya data skunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Hasil dari Penelitian berdasarkan pada pasal 62 huruf a UJUN-P Penyerahan protokol dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD, dalam prakteknya dilapangan masih terdapat kendala seperti terlantardan terlambatnya diserahkan protokol Notaris oleh ahli waris kepada Notaris penerima protokol, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari ahli waris tentang arti pentingnya Protokol Notaris tersebut, dalam prakteknya penyerahan Protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut masih menyimpang terhadap peraturan yang berlaku. Terlebih lagi minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu sendiri kepada ahli waris atau keluarganya mengenai tugas, wewenang serta kewajiban dalam hal protokol Notaris, dalam hal ini MPD selaku lembaga pengawas Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga memiliki peranan terhadap pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap Notaris serta ahli waris Notaris tentang arti pentingnya protokol Notaris tersebut. MPD selaku lembaga pengawas Notaris berwenang untuk mengambil protokol Notaris yang masih terlantar atau yang belum diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris penerima protokol Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pemegang protokol Notaris tentunya harus ada dasar hukum atau landasan hukum berupa surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan Notaris penerima Protokol Notaris, tetapi dalam prakteknya masih ada Notaris selaku penerima protokol Notaris yang belum menerima Surat Keputusan tersebut, hal ini dikarenakan kurang terakomodirnya keputusan dari MPD oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kata kunci : Protokol Notaris, Notaris, Ahli Waris Notaris, MPD.

**ARRANGEMENTS OF SUBMISSION OF NOTARY PROTOCOLS
THAT HAS DIED OF THE WORLD AND ITS PRACTICE
IN WEST SUMATERA PROVINCE**

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out and analyze the provisions of the law on how the Notary Arrangement Regulations have passed away and practice in the province of West Sumatra? and the responsibility of the heirs to the Notary Protocol that has passed away? and legal actions taken by the Regional Supervisory Committee on the Notary protocol that has not been submitted by the heirs to the Notary Recipient of the Protocol? to achieve the objectives of this study the method used is the empirical juridical approach method, namely a study conducted in addition to seeing positive legal aspects also see what the application is in the field, the data examined initially secondary data then proceed with research on primary data in the field by conducting interviews with parties related to this research. The results of the study are based on article 62 letter a UUJN-P Submission of protocols in the case of Notary dies, carried out by the heirs of Notaries to other Notaries appointed by MPD, in practice in the field there are still obstacles such as neglected and late submission of the Notary protocol by heirs to the notary recipient of the protocol, this was due to a lack of understanding and awareness of the heirs about the significance of the Notary Protocol, in practice the surrender Notary Protocol still deviates from the applicable regulations. Moreover, the lack of education and dissemination from the Notary itself to the heirs or their families regarding the duties, authorities and obligations in the Notary protocol, in this case MPD as the notary and organizational organization of the Notary Association of Indonesia (INI) also has a role in providing knowledge and understanding of Notaries and Notaries' heirs about the significance of the Notary protocol. MPD as the Notary supervisory institution is authorized to take the Notary protocol that is still neglected or that has not been submitted by the heir to the Notary who receives the Notary protocol. The Notary in carrying out his position as the holder of the Notary protocol, of course there must be a legal basis or legal basis in the form of a decree from the Minister of Law and Human Rights regarding the appointment of Notary recipients of the Notary Protocol, but in practice there is still a Notary as the recipient of the Notary protocol who has not received the letters of Decree, this is due to the lack of accommodation for the decision of the MPD by the Minister of Law and Human Rights.



Keywords : Notary Protocol, Notary, Notary heirs, MPD